

RINGKASAN

Muhammad Fadirah Fauzi
NIM 210510367

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH TIMUR TERHADAP
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
AKIBAT PERTAMBANGAN MINYAK
ILEGAL DI KECAMATAN RANTO
PEUREULAK
(Dr. Zul Akli, S.H., M.H., dan Hidayat, S.H.,
M.H)**

Kabupaten Aceh Timur, khususnya Kecamatan Ranto Peureulak, memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang telah dieksploitasi sejak zaman kolonial Belanda. Namun, sejak pengelolaan blok tambang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, banyak masyarakat melakukan penambangan minyak secara ilegal, sehingga aktivitas ini menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran, dan korban jiwa akibat kebakaran dan ledakan sumur minyak ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam melindungi lingkungan hidup akibat pertambangan minyak ilegal, serta untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam melaksanakan perlindungan lingkungan hidup.

Penelitian menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan penelitian sosial hukum (*socio legal research*). Data yang diperoleh menggunakan data lapangan (*field research*), metode pengambilan sampel melalui teknik *purposive sampling* dan dianalisis secara kualitatif.

Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terhadap perlindungan lingkungan hidup akibat pertambangan minyak ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih maraknya aktivitas penambangan minyak ilegal yang terus berlangsung. Pemerintah Aceh saat ini sedang menyusun qanun (peraturan daerah) tentang pertambangan minyak rakyat. Hambatan dalam melaksanakan perlindungan lingkungan hidup akibat pertambangan minyak ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak, meliputi regulasi dan penegakan hukum, sosial dan ekonomi, teknis dan operasional. Upaya dalam melaksanakan perlindungan lingkungan hidup dilakukan dengan cara mendorong pengembangan regulasi dan payung hukum, koordinasi dengan APH, imbauan dan edukasi masyarakat, dan KSO bersama PT. Pertamina dan BUMD.

Saran dalam penelitian ini, kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dengan pendekatan yang komprehensif kepada masyarakat dan penambang, mempercepat penyusunan qanun, memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara rutin dan memberikan solusi alternatif terkait mata pencaharian bagi masyarakat yang bergantung pada pertambangan.

Kata Kunci: *Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Perlindungan Lingkungan Hidup, Pertambangan Minyak Ilegal*

SUMMARY

Muhammad Fadirah Fauzi
NIM 210510367

**THE ROLE OF THE EAST ACEH DISTRICT
GOVERNMENT IN ENVIRONMENTAL
PROTECTION DUE TO ILLEGAL OIL
MINING IN RANTO PEUREULAK SUB-
DISTRICT**

**(Dr. Zul Akli, S.H., M.H., dan Hidayat, S.H.,
M.H)**

The East Aceh district, particularly the Ranto Peureulak subdistrict, has oil and gas reserves that have been exploited since the Dutch colonial era. However, since the management of the mining block was handed over to the district government, many communities have been illegally mining oil. This has caused environmental damage and pollution, as well as casualties due to fires and explosions of illegal oil wells.

This research aims to determine the role of the East Aceh district government in protecting the environment due to illegal oil mining, as well as to find out the obstacles and efforts made by the East Aceh District Government in implementing environmental protection

The research uses empirical research methods with a socio legal research approach. The data obtained using field data (field research), sampling method through purposive sampling technique and analyzed qualitatively.

The East Aceh District Government's role in environmental protection due to illegal oil mining in Ranto Peureulak District has not been optimal, as evidenced by the prevalence of illegal oil mining activities. The Aceh government is currently drafting a qanun (regional regulation) on community oil mining. The implementation of environmental protection measures in the Ranto Peureulak sub-district is hindered by various obstacles, including regulatory and law enforcement challenges, as well as socio-economic, technical, and operational issues. To address these challenges, the Aceh government has implemented a multifaceted approach, which includes the development of regulatory frameworks and legal instruments, coordination with the Aceh Police (APH), public appeals and education initiatives, and the establishment of a collaborative partnership (KSO) with PT Pertamina and the Aceh Business Development (BUMD).

This study suggests that the East Aceh District Government improve supervision and law enforcement with a comprehensive approach to the community and miners. The government should accelerate the preparation of qanun and provide regular socialization and education to the community. The government should also provide alternative livelihood solutions for people who depend on mining..

Keywords: *East Aceh District Government, Environmental Protection, Illegal Oil Mining*